



Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rizki Afri Mulia¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIP Imam Bonjol, Indonesia

* penulis korespondensi: rizki.afri.mulia@stisipimambonjol.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 May 2022

Received in revised form 04

June 2022

Accepted 06 June 2022

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. 2) Untuk menguji pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil empiris penelitian ditemukan bahwa: 1) Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat dengan probabilitas sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05. 2) produk domestik regional bruto berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat dengan probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Keyword:

Tingkat Kemiskinan; Produk Domestik Regional Bruto; Kesejahteraan Masyarakat; Indek Pembangunan Manusia.

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki beberapa tujuan, pertama untuk meningkatkan standar hidup (*level of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kedua, penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self esteem*) setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta lembaga-lembaga yang mempromosikan martabat manusia dan

rasa hormat. Ketiga, meningkatkan kebebasan (*freedom/democracy*) setiap orang dalam memilih berbagai variabel pilihan yang ada.

Untuk itu, pembangunan harus meliputi segala bidang secara menyeluruh. Pembangunan yang dilakukan secara parsial akan sulit menyelesaikan permasalahan yang muncul bahkan dapat memperburuk permasalahan yang sudah ada serta memunculkan permasalahan baru (Mulia, 2019). Pembangunan yang

¹rizki.afri.mulia@stisipimambonjol.ac.id

hanya menitikberatkan pada satu aspek akan memicu terjadinya kegagalan pembangunan.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS (2016), masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Sumatera Barat berada pada posisi tiga terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Berbagai indikator dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan di suatu daerah, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan/ tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi secara umum, indikator yang digunakan adalah PDRB. Untuk melihat gambaran tingkat kesejahteraan sosial dalam arti lebih sempit, dapat digunakan IMH (Indeks Mutu Hidup) karena indikator IMH hanya mempertimbangkan variabel-

variabel sosial saja (UNDP (New York, 2004).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dari wilayah Republik Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Provinsi Sumatera Barat yang berkembang pesat yang dapat digunakan sebagai pembanding dengan Padang. Gambaran perbandingan indeks pembangunan manusia di Kota Padang, Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia.

Kualitas hidup masyarakat di suatu negara/daerah tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan IPM Kota Padang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Pada tahun 2018 IPM Kota Padang tercatat sebesar 82,25 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia adalah 71,73 dan 71,39. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Kota Bukittinggi sebesar 80,11 pada tahun 2018. Tingginya IPM menunjukkan cukupnya pemerataan pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat (Statistik, 2018).

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat kemiskinan terbesar terdapat pada daerah Kota Padang yaitu pada tahun 2014 sebanyak 40.700 jiwa sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 44.040 jiwa. Besar kecilnya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan dibawah garis kemiskinan (Statistik, 2018). Peningkatan angka garis kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat membuat jumlah penduduk miskin semakin tinggi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Sumatera Barat selama 5 tahun yaitu tahun 2014-2018. Berdasarkan data yang diperoleh, angka PDRB Per Kapita tertinggi adalah pada Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu Rp46.774,68 pada tahun 2014 menjadi Rp62.654,87 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Siregar & Wahyuniarti, 2007).

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal dan selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan (Todaro, 2006).

Pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat, seperti pilihan untuk sehat, berpendidikan, dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia sebagai proses partisipatif dan dinamis. Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan berkelanjutan (Wijaya, 2017). Manusia

merupakan makhluk primer dan sarana utama dalam pembangunan (Ndakularak et al., 2008). Ada 12 kategori dalam pembangunan manusia yaitu : IPM itu sendiri, kesejahteraan mental, pemberdayaan, kebebasan berpolitik, hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, kondisi kerja, kondisi rekreasi, politik dan keamanan, keamanan ekonomi, kondisi lingkungan (Ranis & Stewart, 2002).

Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masyarakat menjadi lebih buruk meskipun pendapatan per kapita melambung tinggi (Chaniago, 2012). Bank Dunia di bawah kepemimpinan Robert S Mc Namara tidak lagi hanya memberi perhatian pada mobilisasi dan penggunaan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi negara-negara berkembang, tetapi juga menekankan pada tujuan-tujuan sosial, seperti memberantas kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak saja semata-mata untuk kemajuan ekonomi namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja (Chalid & Yusuf, 2014). Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna (Suharto, 2017).

1. Kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan non material. Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being*. Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin.
4. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan

pemasaran pada skala lokal, regional, dan global (Taslim, 2004).

Kemenkokesra menggambarkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi dan realitas Indonesia dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi dan demokrasi. Di dalamnya terdapat dua puluh dua indikator yaitu akses listrik, akses berobat, rekreasi, lama sekolah, pemanfaatan jaminan sosial, usia harapan hidup, akses air bersih, akses sanitasi, tingkat pengeluaran perkapita, tingkat pemerataan pendapatan, kepemilikan rumah sendiri, bekerja, rasio pengeluaran terhadap garis kemiskinan, rasio PAD terhadap APBD, Akses terhadap sumber daya ekonomi, rasio biaya pendidikan terhadap total pengeluaran, rasio biaya kesehatan terhadap total pengeluaran, akses informasi, rasa aman, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi (Mulia & Saputra, 2020).

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Pambudi & Miyasto, 2013). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi sering kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian

dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi dan peningkatan kerja yang nyata. Simon Kunitz mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB). (Sukirno, 2013)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumber daya yang terbatas sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB Per Kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah (Mahdalena et al., 2015).

PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan

pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah (Todaro, 2006). BPS (2012), menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari pembangunan, yang mana kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang, yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri, kemiskinan adalah masalah yang banyak dihadapi khususnya ketika pasca krisis ekonomi tahun 1998 (ERIKA, 2015). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Mahendra, 2016).

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup dan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan adalah fenomena yang multidimensional, demikian pula dengan penyebab kemiskinan. Tidak ada penyebab tunggal untuk menjelaskan kemiskinan, tetapi multi dimensi yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Artinya, usaha untuk menurunkan jumlah penduduk miskin harus diterjemahkan,

bukan hanya sebagai usaha untuk mengurangi jumlah penduduk yang miskin secara ekonomi, tetapi sekaligus juga mengurangi penduduk yang miskin secara sosial maupun politik. Indikator kemiskinan yang terkait dalam analisis kesejahteraan sosial meliputi jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan pendapatan per kapita (Hudaya, 2009).

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara (1986) mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya ukuran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (Indonesia, 2016).

Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen yaitu (Kuncoro, 2013):

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain BPS, UNDP dalam laporan *Human Development Report 1997* memperkenalkan ukuran kemiskinan dimana ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). Kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivation*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan (Syafi'i, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan

cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui atau mengukur keterkaitan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Supomo, 2014). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 95 sampel (Soekidjo Notoatmodjo, 2010).

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) dan dalam penggunaannya pada penelitian diatur dan diolah oleh penulis. Sumber data yang dipergunakan adalah data-data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian kepustakaan, dan riset internet. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Padang, Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat.

Peneliti menggunakan model analisis *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, data bulanan, data kuartalan, dan data tahunan. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam

kurun waktu tertentu dari sampel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* (Widarjono, 2007). Alat analisis yang digunakan adalah *multiple regression*. Model linear digunakan dalam karena sebagian besar variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan linear dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk Miskin (X_1), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (X_2), sedangkan variabel terikat Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Barat (Y). Pada Penelitian ini yang akan menganalisis data panel tiap-tiap variabel dari tahun 2014-2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kemiskinan	1,23	44,43	19,44033	13,33364508
Produk Domestik Regional Bruto	20412,59	62654,87	38858,41	10573,20082
Kesejahteraan Masyarakat	56,73	82,25	71,03728	5,359814886

Berdasarkan tabel 1. bahwa variabel kesejahteraan masyarakat memiliki nilai minimum sebesar 56,73, nilai maksimum sebesar 82,25 dan nilai rata-rata sebesar 71,03728 serta nilai standar deviasi 5,3981. Berdasarkan tabel 6. bahwa variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 1,23, nilai maksimum sebesar 44,43 dan nilai rata-rata sebesar 19,44 serta nilai standar deviasi 13,33. Berdasarkan tabel 6. Bahwa

variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai minimum sebesar 20421,59, nilai maksimum sebesar 62654,87 dan nilai rata-rata sebesar 38858,41 serta nilai standar deviasi 10573,20.

Uji Hipotesis

Analisis regresi ditujukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil dari pengujian regresi berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	55,464	1,801	
	Tingkat Kemiskinan	0,014	0,030	0,036
	Produk Domestik Regional Bruto	0,0003	0,000	0,776

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil tabel 2. menunjukkan bahwa persamaan model regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 55,464 + 0,014X_1 + 0,0003X_2$$

1. Nilai konstanta sebesar 55,464 menunjukkan bahwa bila tingkat kemiskinan dan produk domestik regional bruto sama dengan nol, maka kesejahteraan masyarakat akan sebesar 55,464.
2. Koefisien regresi variabel tingkat kemiskinan (b1) = 0,014, artinya apabila tingkat kemiskinan naik satu satuan dengan variabel independen

- lainnya tetap maka kesejahteraan masyarakat akan naik sebesar 0,014
3. Koefisien regresi variabel produk domestik regional bruto (b2) 0,0003, artinya apabila produk domestik regional bruto satu satuan dengan variabel independen lainnya tetap maka kesejahteraan masyarakat akan naik sebesar 0,0003.

Uji-t ditujukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan cara melakukan uji-t dengan melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen. Apabila nilai probabilitasnya signifikansinya (sig) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diterima jika taraf sig < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf sig > 0,05. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	73,075	0,963		75,912	0,000
	Tingkat Kemiskinan	-0,105	0,041	-0,261	-2,562	0,012
	Produk Domestik Regional Bruto	0,000	0,000	0,763	11,184	0,000

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Berikut penjelasan masing-masing hipotesis dari hasil pengujian regresi ganda di atas yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pada tabel 3. diperoleh nilai signifikansi dari tingkat kemiskinan yaitu sebesar 0,012 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan mempunyai koefisien regresi sebesar -0,105, sehingga variabel tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif

terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Maka secara parsial H1 diterima.

2. Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh produk domestik produk bruto terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pada tabel 3. diperoleh nilai signifikansi dari produk domestik produk bruto yaitu sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,0003, sehingga variabel produk domestik produk bruto berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Maka secara parsial H2 diterima.

Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Barat

Pada hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil ini dilihat dari nilai signifikansi tingkat kemiskinan sebesar $0,012 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H3) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tifa Kurnia Asih dengan hasil penelitian kemiskinan dan selisih kebutuhan layak hidup dan upah minimum kabupaten berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penduduk miskin menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan layak serta masalah yang terjadi pada selisih upah selain memberi jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penetapan upah minimum masih mengalami kendala sebagai akibat belum

terwujudnya satu kesamaan upah di kabupaten/kota. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stevenie Dhea dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan PDRB dan APBD Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

Menurut UNDP hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat.

Lanjouw, dkk. menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Barat

Pada hasil uji statistik diperoleh bahwa terdapat pengaruh signifikan antara produk domestik regional bruto terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil

ini dilihat dari nilai signifikansi Produk Domestik Regional Bruto sebesar $0,000 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devani Ariestha Sari dengan hasil penelitian Secara parsial, variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah menyatakan bahwa Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan sebesar 10.29696 terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014. Apabila PDRB naik, maka akan menyebabkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat juga akan naik, sehingga dengan naiknya pendapatan per kapita maka tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur akan meningkat.

Menurut Midgley, menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan

produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Mazumdar mengatakan bahwa pembangunan manusia berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, karena peningkatan pembangunan manusia akan menghasilkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil empiris penelitian Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Barat Tahun 2014-2018, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi tingkat kemiskinan adalah sebesar $-0,105$ dengan probabilitas sebesar $0,012$ yang lebih kecil dari $0,05$ yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat maka akan semakin rendah kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat dan begitu juga sebaliknya.
2. Nilai koefisien regresi produk domestik regional bruto sebesar $0,0003$ dengan probabilitas sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$ menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Artinya, semakin tinggi produk domestik regional bruto di Sumatera Barat maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat dan begitu juga sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Chaniago, A. A. (2012). *Gagalnya pembangunan: membaca ulang keruntuhan Orde Baru*. LP3ES.
- ERIKA, S. (2015). *ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATRA BARAT*. UPT. Perpustakaan.
- Hudaya, D. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Skripsi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor*.
- Indonesia, S. (2016). *Computation and Analysis of Macro Poverty of Indonesia 2016*.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Mahdalena, M., Simanjuntak, P., & Nopeline, N. (2015). *ANALISIS SEKTOR BASIS DAN POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN DELI SERDANG*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nommensen Volume VI Januari*, 16.
- Mahendra, A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Dan Akuntansi*, 2(2), 123–148.
- Mulia, R. A. (2019). Influence Of Public Policy, Participation Of Community And Education Level To Public Welfare In Padang Pariaman District. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), 37–56.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83.
- Ndakularak, E., Setiawina, N. D., & Djayastra, I. K. (2008). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Jurnal Studi Universitas Udayana*.
- Pambudi, E. W., & Miyasto, M. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 51–61.
- Ranis, G., & Stewart, F. (2002). *Economic growth and human development in Latin America*.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. *IPB Dan Brighten Institute. Bogor*.
- Soekidjo Notoatmodjo, -. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan* (Ed. rev). Rineka Cipta.
- Statistik, B. P. (2018). *Statistik Tahunan. Berbagai Tahun Penerbitan Diakses Pada*, 27.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi teori pengantar edisi ketiga* (Ed. 3). Raja Grafindo Persada.
- Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi & Manajemen)*. BPFE.
- Syafi'i, A. (2001). Bank Syariah dari teori

ke praktik. Jakarta: Gema Insani.

Taslim, A. (2004). Metode kesejahteraan masyarakat. IPB. Bogor.

Todaro, M. P. (2006). *Economic development* (9th ed.). NY: Addison Wesley, 2006.

UNDP (New York, N. Y. etc. . (2004). *Human Development Report 2004: Cultural liberty in today's diverse world*. Oxford University Press.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis (Econometrics: Theory and Application for Economics and Bussiness.(2nd edn) Yogyakarta: EKONISIA.*

Wijaya, H. (2017). ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA. *Coopetition*, 8(1), 27.